

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PANDANGAN PEREMPUAN BALI: STUDI FENOMENOLOGIS TERHADAP PENULIS PEREMPUAN BALI

Ni Made Diska Widayani¹, Sri Hartati²

¹Fakultas Psikologi Universitas Semarang
Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang 50196

²Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Jl. Prof Sudharto SH, Tembalang, Semarang 50275

mediska_widayani@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the perception of Balinese women towards gender equality and justice (GEJ) concepts within the scope of Balinese culture. This is a qualitative-phenomenological study. Subjects were defined based on literature review that resulted three women participated in this study. Depth interview and semi-participant observation was used to collect data. The results showed that GEJ was interpreted differently by each subject. Subject 1 perceived patriarchal culture of Bali is a gender-equitable culture, while Subject 2 and 3 perceived patriarchal culture of Bali is not a gender-equitable culture. To what extent subjects resolved their problems related to the patriarchal culture of Bali in the past impacted their perception on gender equality and justice. Their perception on GEJ were influenced by external factors (such as Balinese culture, educational level, parenting) as well as internal factors (such as needs, attitudes, self-concept, conformity, beliefs, future expectation, value of Balinese women, families and children; resistance as a manifestation of problems encountered by each subject; and social support as a supporting factor that help subjects to resolve their problems).

Keywords: gender equality and justice, Balinese women, patriarchal culture

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam ruang lingkup budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologis. Subjek penelitian sebanyak tiga orang yang diperoleh melalui hasil penelusuran literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKG dimaknai berbeda oleh tiap subjek. Subjek 1 menganggap budaya patriarki Bali adalah setara dan adil secara gender, sedangkan Subjek 2 dan 3 menyatakan budaya patriarki Bali tidaklah setara dan adil secara gender. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh terselesaikan atau tidaknya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing subjek akibat budaya patriarki Bali. Proses pembentukan persepsi terhadap KKG dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti: kebudayaan Bali, pendidikan, pola asuh) dan faktor internal (seperti kebutuhan, sikap, konsep diri, penyesuaian diri, keyakinan, harapan di masa depan, penilaian perempuan Bali, keluarga dan anak, resistensi sebagai manifestasi dari permasalahan yang dihadapi tiap subjek; serta dukungan sosial sebagai faktor pendukung subjek dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi).

Kata kunci: kesetaraan dan keadilan gender, perempuan Bali, budaya patriarki

PENDAHULUAN

Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki, untuk menjamin agar proses itu adil bagi

perempuan dan laki-laki perlu tindakan-tindakan untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk berperan dan menikmati hasil dan peran

yang dimainkannya. Keadilan gender mengantarkan perempuan dan laki-laki menuju kesetaraan gender (KMNPP RI, 2001). Kesetaraan gender adalah keadaan bagi perempuan dan laki-laki menikmati status dan kondisi yang sama untuk merealisasikan hak azasnya secara penuh dan sama-sama berpotensi dalam menyumbangannya dalam pembangunan, dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka lakukan (KMNPP RI, 2001).

Keunikan dan kekhasan kebudayaan Bali tidak terlepas dari kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal. Menurut Sancaya (dalam Wiasti, 2006), budaya patriarki dalam kebudayaan Bali dinyatakan bersumber dari adanya konsep *purusha* dan *predana*, yang melambangkan jiwatman (roh) yang bersifat abadi (*purusha*), dan fisik manusia yang mempunyai sifat berubah-ubah (*prakirti*). Di dalam masyarakat, konsep ini lebih dikenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki atau *purusha*, dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan atau *predana*. Konsep ini dijadikan sebagai landasan untuk membedakan status dan peran antara perempuan dengan laki-laki, yang dalam hal tertentu tidak bisa saling menggantikan (Wiasti, 2006). Filsafat agama Hindu ini kemudian menjawai ideologi budaya Bali, yang berkembang menjadi sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan, yang disebut hukum adat dan *awig-awig* yang bercorak patrilineal, yang berfungsi sebagai kontrol sosial (Astuti dalam Wiasti, 2006).

Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilinealnya. Menurut Holleman dan Koentjaraningrat (dalam Sudarta, 2006), sistem kekerabatan patrilineal merupakan pola tradisional yang

dicirikan sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orangtua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat; dengan perkataan lain, wanita yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda.

Ciri-ciri tersebut menggambarkan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, pria mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan atau kesenjangan terhadap hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan. Puspa (2008) menyatakan bahwa akibat dari budaya patriarki yang sebagian besar berlaku di tanah air, termasuk di Bali, menyebabkan perempuan terkadang menjadi subordinasi laki-laki. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dampak dari budaya patriarki adalah kedudukan kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Arjani (2006) menyatakan budaya patriarki cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan, seperti perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif ini dapat dilihat dari data statistik yang mengungkapkan bahwa masih terjadinya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan mengenai kesempatan pendidikan yang diperoleh di Bali. Perempuan memiliki kesempatan pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki (Arjani, 2006). Kesenjangan gender yang terjadi ini pada dasarnya menggambarkan status, kedudukan, dan kualitas penduduk

perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan tentang perbedaan status serta peran laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bali sudah diperlihatkan sejak masih kecil atau anak-anak. Masyarakat memberi nilai yang lebih tinggi terhadap anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan.

Adanya ideologi gender, menurut pemikiran Rogers (dalam Wiasti, 2006) menjelaskan bahwa adanya hubungan konseptual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan konseptual ini dapat dipelajari dengan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan dalam ideologi dan perilaku laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam ideologi ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan menganggap dirinya masing-masing secara mendasar berbeda satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan diharapkan mempunyai persepsi tersendiri mengenai nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan.

Tiap individu dalam memandang kesetaraan dan keadilan gender dapat memiliki pemahaman yang berbeda meskipun mempunyai latar belakang budaya yang sama. Pemahaman yang berbeda ini disebabkan karena selain manusia itu merupakan individu yang unik dan *individual differences*, individu-individu tersebut memiliki faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi konsep berpikir dan mempersepsikan suatu pengalaman, termasuk pula pengalaman mengenai budaya Bali dihubungkan dengan pemaknaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Fakta yang telah dikemukakan berkaitan dengan kesenjangan gender yang dialami oleh perempuan Bali, bertolak belakang dengan ajaran agama Hindu yang menyatakan bahwa perempuan diakui sejajar dengan laki-laki (Wiana, 2000). Berpijak pada dasar tersebut, maka terdapat

ketidaksesuaian antara pelaksanaan adat dengan agama dalam kebudayaan Bali. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, adat Bali berpijak pada ajaran agama Hindu, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak demikian. Wibhawa (2006) menyatakan banyak fakta yang terjadi merupakan tradisi-tradisi yang salah dan dianggap merupakan bagian dari sebuah agama, atau tradisilah yang diagamakan bukan agama yang ditradisikan. Agama dan tradisi (adat) adalah dua konsep yang berbeda, keduanya bersifat melengkapi. Idealnya tradisi (adat) menyesuaikan dengan agama, bukan agama yang menyesuaikan dengan tradisi, terlebih jika tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran agamanya.

Fakih (2005) menyatakan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi atau pembatasan dalam pengambilan keputusan terjadi karena diperkuat juga oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Menurut Yuarsi (dalam Tirtayani, 2007), perempuan memiliki lebih banyak aturan yang harus ditaati dan berarti juga perempuan lebih banyak melaksanakan tugas. Kondisi demikian yang membuat kedudukan laki-laki menjadi semakin lebih dominan.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebudayaan Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kesenjangan gender yang dialami oleh kaum perempuan Bali. Perempuan Bali menjadi kajian utama dalam permasalahan gender ini karena adat dan tradisi Bali sangat membelenggu kaum perempuan, bahkan anak perempuan Bali boleh disebutkan sebagai “kelas dua” setelah lelaki (Manikgeni, 2007). Menurut Geriya (2006), tantangan atau hambatan wanita (khususnya wanita Hindu Bali) masih terhimpit dalam sistem sosial, sering juga

kena “penyakit” budaya, yaitu terikat dengan sistem kekerabatan orang Bali yang masih menganut sistem patrilineal.

Berdasarkan uraian dan asumsi di atas, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana persepsi perempuan Bali terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam budaya Bali? Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi perempuan Bali dalam memaknai konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam ruang lingkup budaya Bali, realitas-realitas yang terjadi pada perempuan Bali, dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi perempuan Bali tersebut.

METODE

Subjek penelitian ini berjumlah tiga orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria subjek sebagai berikut:

- 1) Perempuan, bersuku Bali, dan beragama Hindu. Perempuan Bali merupakan kaum yang tersubordinasikan kedudukannya secara adat istiadat dalam budaya Bali yang berbentuk patriarki.
- 2) Bertempat tinggal dan dibesarkan di Bali, sehingga dapat mengetahui, memahami dan menjalankan bagaimana seluk beluk adat istiadat Bali.
- 3) Telah menikah dan memiliki anak, atau berkeluarga. Perempuan Bali yang telah menikah dan memiliki anak, atau berkeluarga umumnya telah matang secara psikologis, atau telah memiliki kesiapan kognitif, afektif dan perilaku, sehingga diharapkan dapat memainkan perannya bersama individu lain dalam masyarakat.
- 4) Memiliki karya tulis yang telah dipublikasikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keseriusannya dalam menanggapi permasalahan-permasalahan gen-

der yang dialami oleh kaum perempuan terutama sebagai perempuan Bali, baik itu berupa karya sastra, pandangannya sendiri, atau merupakan hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi semi-partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaum perempuan Bali memiliki definisi konsep KKG yang berbeda dengan yang dikemukakan di atas. Subjek 1 menyatakan konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang dikemukakan merupakan proyek pemerintah yang lahir dari konsep kesetaraan gender dari budaya Barat, yaitu KKG akan terwujud apabila kaum laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama, sedangkan konsep kesetaraan gender menurut budaya Timur adalah KKG akan terwujud apabila kaum laki-laki dan perempuan saling bekerja sama secara harmonis dan seimbang dalam mengerjakan perannya masing-masing.

Konsep KKG dari pemerintah yang berasal dari konsep budaya Barat dibenarkan oleh Megawangi (1999) yang menyatakan konsep kesetaraan gender menurut UNDP (*United Nations Development Program*) sebagai konsep kesetaraan kuantitatif (50/50), yaitu kesetaraan sama rata antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, dan partisipasi politik. Megawangi (1999) memandang relasi gender sebagai relasi yang komplementer, meskipun berbeda dalam peran tetapi tetap bersatu dalam mencapai tujuan yang sama. Subjek 3 memahami konsep KKG sebagai pemerolehan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Tawney (dalam

Megawangi, 1999) yaitu kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perorangan.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (KMNPP, 2000). Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung berupa perlakuan atau sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma ataupun struktur masyarakat (KMNPP RI, 2001). Subjek 1 menyatakan pada budaya Bali secara khusus dan di Indonesia secara umum tidak terjadi permasalahan dalam bidang gender, apabila ada perbedaan terhadap sistem yang dikenakan pada kaum laki-laki dan perempuan disebabkan karena sumber daya yang dimiliki pada laki-laki dan perempuan memang berbeda, sehingga jika memperoleh perlakuan yang dibedakan pun adalah merupakan sesuatu yang wajar. Pendapat Subjek 1 dibenarkan oleh Megawangi (1999) yang menyebutkan kemampuan yang berbeda antara pria dan wanita disebabkan oleh adanya keragaman biologis atau disebut dengan kemampuan spesifik. Adanya keragaman biologis tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan publik kesetaraan 50/50 hampir tidak mungkin dapat terwujud (Megawangi, 1999).

Subjek 3 menyatakan kaum perempuan Bali tidak merasa mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya sebagai sebuah kewajiban, meskipun sebenarnya kaum perempuan Bali merasakan beban kerja akibat ketimpangan peran yang diterimanya. Menurut Surpha (2006), umat Hindu memandang “bekerja” sebagai *yajna* atau upacara korban suci

keagamaan sehingga setiap umat Hindu diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan *swadharma*-nya, fungsi, status dan profesinya dalam masyarakat. Subjek 3 juga menyatakan suatu keadaan dikatakan sebagai ketidakadilan gender apabila kaum perempuan tidak menikmati suatu kondisi tertentu yang dibebankan kepadanya.

Handayani dan Sugiarti (2008) menyatakan bahwa faktor penyebab ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya di Indonesia berdasarkan hukum hegemoni patriarki. Subjek 2 dan 3 memaknai bahwa ketidakadilan secara jelas terjadi dalam adat Bali yang bersifat patriarki dan memposisikan kedudukan kaum laki-laki di atas kaum perempuan, karena ketika ada kaum laki-laki yang berinisiatif membantu melakukan peran reproduktif yang semestinya hanya dikerjakan oleh kaum perempuan dianggap adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial merupakan suatu kesalahan.

Fakih (2005) menyatakan bias gender terjadi karena adanya keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki. Setiadi dkk (2006) mengemukakan fungsi kontrol sosial sebagai kendali terhadap proses perkembangan kebudayaan baru apabila dinilai bertentangan dengan keyakinan kelompok sosial tertentu yang menganut kebudayaan tradisional selama turun temurun. Griadhi (dalam Surpha, 2006) menjelaskan adanya pikiran tradisional pada masyarakat Bali menjadi dasar terbentuknya hukum pelanggaran adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan di desa, yang berupa sanksi sosial seperti beban mental dan psikologis. Pernyataan Griadhi tersebut sesuai dengan pendapat

Subjek 3 yang menyatakan beban kerja yang dirasakan kaum perempuan Bali menjadi beban psikis yang tidak mampu diungkapkan secara frontal karena pengaruh budaya dan kontrol sosial yang sangat kuat sehingga hanya bisa diterima walaupun dengan rasa berat hati.

Menurut Handayani dan Sugiarti (2008), perempuan memiliki tiga peran dalam kehidupannya, yaitu peran reproduktif, peran produktif dan peran sosial. Subjek 3 memaknai ketiga peran atau multiperan yang dibebankan kepada kaum perempuan merupakan suatu bentuk ketimpangan peran, karena ketiga peran tersebut tidak dibebankan juga kepada kaum laki-laki. Menurut Fakhri (2005), adanya anggapan gender bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara, rajin, dan tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan, di mana peran gender tersebut disosialisasikan kepada kaum perempuan sejak dini, sedangkan kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik tersebut sehingga menyebabkan terjadinya beban kerja yang berlebih pada kaum perempuan.

Subjek 2 dan 3 sama-sama memaknai beban kerja sangat dirasakan oleh kaum perempuan Bali karena harus menjalankan tiga peran dalam kehidupannya, yaitu peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial. Kedua subjek menyatakan dalam melakukan peran sosial dan peran produktif, kaum perempuan tidak bisa berkonsentrasi dan bertotalitas secara penuh karena harus membagi perhatiannya juga kepada peran reproduktif. Menurut Handayani dan Sugiarti (2008), dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran perempuan mengalami perkembangan yang cepat; tetapi perkembangan perempuan

yang pesat tersebut tidak mengubah peranannya yang lama, yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga atau peran reproduktif. Hal ini mengakibatkan perkembangan peranan perempuan sifatnya bertambah dan umumnya perempuan mengerjakan berbagai peran sekaligus, baik peran domestik maupun peran produktif, untuk memenuhi tuntutan pembangunan sehingga beban kerja perempuan menjadi lebih berat.

Surpha (2006) menyatakan bahwa hak waris di Bali berdasarkan penghayatan dan kemanusiaan atas azas patrilineal atau *purusha*. Subjek 3 memaknai sistem pewarisan di Bali sebagai kondisi yang tidak adil bagi kaum perempuan karena kaum perempuan sama sekali tidak memperoleh bekal atau modal sebagai sumber daya pribadinya untuk memperoleh status dan kedudukan yang sesuai, serta untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri.

Subjek 2 memaknai ketidakadilan gender terjadi pada kaum perempuan di bidang pendidikan akibat budaya patriarki Bali, karena lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki yang merupakan penerus keturunan keluarga, dan menganggap tidak ada gunanya menyekolahkan anak perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena nantinya pasti akan keluar dari keluarga asal atau diambil oleh pihak keluarga suami. Behrman (Megawangi, 1999) menyatakan adanya alokasi sumber daya keluarga dengan model investasi murni, yang berlaku pada keluarga dalam kondisi miskin sehingga sumber daya yang ada akan dialokasikan pada sektor yang paling menguntungkan, biasanya prioritas utama akan diberikan kepada anak laki-laki karena nantinya diharapkan dapat membantu penghasilan keluarga ketika sudah bekerja. Akibat keterbatasan materi, maka pendidikan anak perempuan akan menjadi prioritas kedua

karena diharapkan nantinya akan bergantung kepada pihak suami. KMNPP RI (2001) menyatakan bahwa subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.

Subjek 3 memaknai pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dan kepentingan untuk memperoleh pendidikan sehingga seharusnya mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk itu, tetapi pada kenyataannya di Bali menunjukkan kaum perempuan Bali diperlakukan berbeda dalam pemerolehan kesempatan mendapatkan pendidikan karena nilai anak laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan.

Peran gender (*gender role*) adalah suatu set harapan yang menetapkan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan berperasaan (Santrock, 2003). Subjek 1 menginterpretasikan konsep peran gender sebagai pelaksanaan suatu peran yang harus dikerjakan secara seimbang, harmonis, dan terkoordinasi dengan baik, serta tidak adanya pembedaan peran yang dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu. Bern (dalam Santrock, 2003) mengemukakan adanya klasifikasi peran gender dengan menggunakan konsep androgini. Konsep androgini merupakan konsep pendidikan bebas gender yang mengasumsikan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama untuk menjadi maskulin dan feminin sehingga perlu diperlakukan secara sama (Megawangi, 1999). Pernyataan tersebut mendukung pandangan Subjek 1 yang memaknai konsep gender bersifat androgini, yang terbentuk dari dominasi salah satu perilaku maskulin atau feminin yang secara bersama-sama berada dalam diri satu individu.

Subjek 2 menginterpretasikan konsep peran gender yang terkonstruksi di Bali sudah

seimbang antara hak dan kewajibannya antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, tetapi pada pelaksanaannya, masyarakat dari budaya yang berbeda akan melihat adanya ketimpangan peran pada peran yang dijalankan oleh perempuan Bali karena terlihat menjalankan peran yang lebih berat daripada kaum laki-laki. Surpha (2006) menjelaskan adanya gambaran sosial di Bali yang menunjukkan bahwa kaum perempuan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat yang biasanya di daerah lain pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kaum laki-laki, hal tersebut merupakan sebuah bentuk penghargaan masyarakat Bali terhadap emansipasi kaum perempuan yang sesungguhnya memang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya lazim dikerjakan oleh kaum laki-laki.

Subjek 2 memaknai kaum perempuan memiliki nilai yang suci dan terhormat dan kedudukannya yang setara dengan kaum laki-laki karena diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang sama. Bhagawadghita 1.40 (Puspa, 2008), menyatakan “*Adharmabhibavat krsna pradusyanti kula strisu dustasu varsneya, jayate varna-sankarah*”, yaitu apabila hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela dalam keluarga, seperti kaum wanita dalam keluarga ternoda, dan dengan merosotnya kaum wanita, maka akan lahir keturunan yang tidak diinginkan. Pada kitab Manawa Dharma Sastra III.55 (Puspa, 2008) juga menguraikan standar peraturan keluarga yang mengharuskan menghormati kaum perempuan disertai konsekuensi yang akan terjadi kalau peraturan itu tidak dipatuhi, dengan menyatakan “*Pitrbrhir bhratrbrhis, caitah patibhir devaraistatha; Pujya bhusayita vyasca, bahu kalyanmipsubhih*”, yaitu wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri. Selanjutnya, kitab Manawa Dharma Sastra III.56 juga

menyatakan “*Yatra naryastu pujiyante, ramante tatra devatah Yatraitastu na pujiyante, sarvaslalah kriyah*”, yaitu dimana wanita dihormati, di sanalah dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala (Puspa, 2008). Menurut ajaran agama Hindu, wanita dan pria sama-sama diciptakan oleh *Sang Hyang Widi Wasa*, bukan dilahirkan dari tulang rusuk kaum adam. Hal tersebut sesuai dengan yang termuat di dalam Manawa Dharmasastra 1.32 dinyatakan, bahwa wanita dan laki-laki sama-sama merupakan ciptaan Tuhan (Puspa, 2008).

Surpha (2006) menyatakan masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh kebudayaan Bali dan agama Hindu, dimana pandangan hidup tersebut mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan pikiran-pikiran mendalam mengenai wujud kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Subjek 2 menegaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian mengenai kedudukan kaum perempuan dengan kaum laki-laki antara ajaran agama Hindu dengan budaya patriarki Bali yang menganut sistem kekerabatan secara patrilineal. Menurut PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), menyatakan bahwa tidak semua adat istiadat Bali yang pada mulanya dikira pengamalan dari ajaran agama Hindu yang bersumber dari ajaran agama Hindu, dapat dipertanggungjawabkan sebagai Adat Agama Hindu (Surpha, 2006).

Gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seseorang sebagai laki-laki atau perempuan (Santrock, 2003). Handayani dan Sugiarti menjelaskan gender sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan, bersifat dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat melainkan dibedakan atau dipilah menurut kedudukan,

fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (2008). Pernyataan di atas didefinisikan dengan baik oleh Subjek 3 yang menjelaskan konsep gender merupakan hasil karya manusia yang sifatnya dapat berkembang dan mengalami perubahan, serta menyatakan konsep gender sebagai sebuah konsep yang tidak bisa digeneralisasikan pada tempat yang berbeda, bersifat relatif karena dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman.

Proses persepsi dan aspek yang mendukung

Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan, dan alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi (Sarwono, 1999). Pelaksanaan proses persepsi berkaitan erat dengan proses penilaian diri dan orang lain. Hurlock (dalam Gufron dan Risnawita, 2010) mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif dan prestasi yang mereka capai.

Pujijogjanti (dalam Gufron & Risnawita, 2010) mengatakan ada tiga peran penting konsep diri sebagai penentu perilaku, yaitu:

1. Konsep diri berperan dalam mempertahankan keselarasan batin. Pada dasarnya individu selalu mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan batinnya.
2. Keseluruhan sikap dan pandangan individu terhadap diri berpengaruh besar terhadap pengalamannya. Setiap individu akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap sesuatu yang dihadapi.
3. Konsep diri adalah penentu pengharapan individu. Pengharapan adalah inti dari

konsep diri. Konsep diri merupakan seperangkat harapan dan penilaian perilaku yang menunjuk pada harapan tersebut.

Calhoun dan Acocella (dalam Gufron dan Risnawita, 2010) mengatakan konsep diri terdiri dari tiga dimensi atau aspek, yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan tentang diri berasal dari diri pribadi dan kelompok sosial yang diidentifikasi oleh individu tersebut. Pada dasarnya kaum perempuan Bali mengetahui gambaran dirinya sendiri secara keseluruhan. Ketiga subjek memahami kebutuhan dan sikap mereka dalam menghadapi beragam persoalan. Ketiga subjek juga mengerti tugas-tugas yang harus diemban sebagai seorang perempuan Bali. Mereka menerima secara sadar tugas, peran dan tanggung jawab dalam multiperan yang harus dikerjakannya sebagai suatu kewajiban. Menurut Jensen dan Suryani (Suryani, 2003), orang Bali selalu berusaha mencapai keadaan tenang dan *rahayu* dengan mengekspresikan emosinya secara *non-verbal*, berusaha mengontrol emosi, dan menerima sesuatu secara pasif (*passive acceptance*) tanpa suatu protes walaupun hal tersebut tidak berkenan di hati. Ketiga subjek tersebut menyadari pengaruh kebudayaan patriarki Bali menjadi landasan pedoman dalam bertingkah laku di Bali, termasuk peraturan dalam adat, sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Subjek 2 secara khusus memiliki perbedaan dengan kedua subjek lainnya. Subjek 2 memiliki pengetahuan agama Hindu yang cukup baik, pengetahuan tersebut mendasari pemahaman mengenai pengetahuan terhadap diri sendiri, harapan, gambaran ideal, dan penilaian dirinya. Pada subjek 2 sebenarnya juga terjadi konflik yang mendasar dimana pada umumnya kaum perempuan Bali merasakan budaya patriarki sebagai budaya yang tidak adil

terhadap kaum perempuan. Adanya ketidaksesuaian antara kedudukan kaum perempuan dan kaum laki-laki pada ajaran agama Hindu dan budaya patriarki Bali menjadi dasar terjadinya konflik pada diri Subjek 2, tetapi adanya konsep ajaran agama Hindu seperti *Panca Sradha* (lima dasar kepercayaan dalam agama Hindu), *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kesejahteraan dalam agama Hindu, yaitu dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan dirinya sendiri, alam semesta, dan *Sang Hyang Widi Wasa* atau Tuhan) dan *Tri Kaya Parisudha* (tiga jenis perbuatan dalam agama Hindu yaitu berpikir, berkata dan berbuat yang benar); yang berguna sebagai penyelaras ketenangan batin mendukung terbentuknya konsep diri yang positif pada Subjek 2.

2. Harapan

Individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat berbeda pada masing-masing individu. Setiap individu memiliki harapan dan gambaran ideal dalam kehidupannya. Adanya konsep diri ideal yang dimaknai secara berbeda oleh masing-masing individu, maka harapan dan gambaran ideal pada ketiga subjek juga tidak sama. Pada dasarnya gambaran ideal dan harapan yang dimiliki ketiga subjek merupakan sebuah standarisasi kesempurnaan terhadap sebuah objek dan keinginan yang didistribusikan melalui objek atau orang lain yang berkaitan dengan mereka. Konsep diri mereka dapat terbentuk secara positif apabila mereka mampu mewujudkan atau mendekati gambaran ideal dan harapan yang mereka inginkan.

3. Penilaian

Di dalam penilaian ini individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Ketiga subjek yang memahami hak dan kewajiban sebagai kaum perempuan Bali, pada dasarnya

memiliki penilaian yang hampir sama terhadap konsep diri mereka. Penilaian yang hampir sama ini disebabkan karena karakteristik subjek penelitian yang memiliki latar belakang yang hampir sama pula, yaitu dalam hal jenis kelamin, domisili, status pernikahan, jenjang pendidikan dan hasil karya yang dipublikasikan kepada masyarakat, yang membedakan adalah pemaknaannya terhadap pengalaman yang mereka alami selama rentang waktu kehidupan mereka.

Ketiga subjek yang sama-sama dituntut untuk mengerjakan berbagai peran sebagai seorang kaum perempuan Bali memiliki kemampuan regulasi diri yang cukup baik. Adanya keseragaman latar belakang jenjang pendidikan yang cukup tinggi pada ketiga subjek mendukung pencitraan diri dan keyakinan diri yang positif terhadap kemampuannya yang termanifestasikan dalam peran produktif masing-masing subjek.

Pemaknaan pengalaman yang dipahami secara berbeda oleh masing-masing subjek akan turut mempengaruhi bagaimana sikap dan pandangan mereka terhadap kebudayaan patriarki Bali. Adapun perbedaan sikap dan pandangan tersebut disebabkan oleh konflik yang timbul, dan penyelesaian terhadap konflik tersebut.

Subjek 1 memiliki pemaknaan terhadap kebudayaan patriarki yang berbeda dengan kedua subjek lainnya. Subjek 1 menyatakan budaya patriarki sudah setara dan adil secara gender. Subjek 1 sebenarnya memiliki pengalaman yang sama dengan kedua subjek lainnya sebagai kaum perempuan Bali yang besar dan tinggal di Bali, sehingga Subjek 1 juga memiliki konflik atas budaya tersebut. Aspek yang mendukung terjadinya perbedaan pemaknaan pada Subjek 1 adalah adanya dukungan sosial, baik dalam bentuk

instrumental dan emosional dari pihak suami, anak-anak, menantu dan keluarga besar subjek terhadap berbagai peran yang harus dijalankannya sehingga terbentuk penyesuaian diri yang baik pada diri subjek 1. Menurut Rodin & Salovey (dalam Smet, 1994), perkawinan dan keluarga merupakan sumber dukungan sosial yang paling penting. Kondisi ini menjelaskan bahwa Subjek 1 mampu menyelesaikan konfliknya sehingga berdampak positif terhadap konsep diri dan pandangannya terhadap budaya patriarki Bali.

Subjek 2 dan 3 sama-sama menyatakan bahwa budaya Bali tidak setara dan adil secara gender. Kesamaan persepsi ini dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda pada kedua subjek. Pada Subjek 2, pemaknaan tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara kedudukan kaum perempuan dan kaum laki-laki pada ajaran agama Hindu dan budaya patriarki Bali. Pada Subjek 3, pemaknaan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasannya terhadap kondisi yang diterima oleh kaum perempuan Bali, seperti permasalahan hak waris dan multiperan yang harus dikerjakan. Kedua subjek ini sama-sama mengalami konflik yang tidak terselesaikan, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Subjek 2, konflik yang terjadi tersebut ditanggulangi oleh tingkat *belief* yang tinggi sehingga tercipta konsep diri yang positif pada Subjek 2. Pada Subjek 3, konflik tersebut semakin tidak terselesaikan karena Subjek 3 merasa dirinya tidak didukung oleh pihak terdekat seperti saudara, suami, dan anak-anaknya. Coyne & Downey (1991) menyatakan hubungan yang bermutu kurang baik, jauh lebih banyak mempengaruhi kekurangan dukungan yang dirasakan daripada tidak ada hubungan sama sekali (Smet, 1994).

Proses menilai orang lain atau persepsi sosial didefinisikan sebagai persepsi mengenai orang itu atau orang-orang lain

dan digunakan untuk memahami orang dan orang-orang lain (Sarwono, 1999). Dalam persepsi sosial ada dua hal yang ingin diketahui yaitu keadaan dan perasaan orang lain saat ini, di tempat ini melalui komunikasi non lisan (kontak mata, busana, dan gerak tubuh) atau lisan dan kondisi yang lebih permanen yang ada di balik segala yang tampak saat ini (niat, sifat, dan motivasi) yang diperkirakan menjadi penyebab dari kondisi saat ini.

Ketiga subjek memiliki persepsi yang berbeda terhadap konsep Kesenjangan dan Keadilan Gender pada budaya patriarki Bali. Perbedaan persepsi ini disebabkan oleh adanya faktor eksternal dan internal yang berpengaruh. Faktor eksternal berupa kebudayaan Bali, pendidikan, dan pola asuh. Faktor internal berupa kebutuhan, sikap, penilaian, dukungan sosial, resistensi, penyesuaian diri, *future expectation* dan kepercayaan. Kedua faktor tersebut muncul dari pengalaman-pengalaman yang dimaknai secara berbeda oleh masing-masing subjek.

Sarwono (1999) menyatakan persepsi bersifat subjektif, karena tergantung pada subjek yang melaksanakan persepsi. Perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh jenis kelamin, perbedaan generasi dan perbedaan lingkungan sosial budaya akan menghasilkan persepsi sosial yang berbeda dan reaksi yang berbeda pula (Markovsky dalam Sarwono, 1999). Adanya perbedaan persepsi tersebut tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali kecenderungan persamaan dalam persepsi.

Ketiga subjek memiliki karakteristik dasar yang sama untuk diteliti supaya memperoleh hasil penelitian yang akurat, salah satunya dengan kesamaan jenis kelamin. Adanya kesamaan jenis kelamin pada masing-masing subjek, menggambarkan kondisi yang diterima pada umumnya hampir sama, yaitu sebagai kaum

perempuan Bali yang menerima hak dan kewajiban yang sama. Pengurangan perbedaan persepsi ini juga dimunculkan dengan salah satu karakteristik berikutnya, yaitu kesamaan domisili, sama-sama besar dan tinggal di Bali sehingga memahami benar bagaimana kebudayaan Bali menjadi dasar pedoman masyarakat Bali dalam bertingkah laku. Kesamaan status pernikahan dan hasil karya yang dipublikasikan kepada masyarakat juga turut menjadi karakteristik subjek penelitian yang diharapkan dapat memperkecil perbedaan persepsi dan diperoleh data dan hasil penelitian yang objektif, tetapi ternyata tetap saja perbedaan persepsi muncul pada ketiga subjek tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah persepsi terhadap konsep KKG terpecah menjadi dua kubu, yaitu budaya patriarki Bali sudah setara dan adil menurut Subjek 1 dan budaya patriarki Bali belum setara dan adil menurut Subjek 2 dan 3. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, perbedaan persepsi tersebut dapat muncul karena antara Subjek 1 dengan Subjek 2 dan 3 berbeda generasi. Subjek 1 berada pada tahapan perkembangan dewasa lanjut, sedangkan Subjek 2 dan 3 berada pada tahapan perkembangan dewasa madya. Subjek 1 masih memiliki pemikiran tradisional yang kuat terhadap pemahaman adat Bali. Perbedaan persepsi juga muncul akibat perbedaan budaya pada Subjek 1 dengan Subjek 2 dan 3. Meskipun ketiga subjek sama-sama besar dan tinggal di Bali, tetapi adanya perbedaan budaya juga tetap muncul karena perbedaan kebiasaan kegiatan adat dan keagamaan pada masing-masing desa adatnya. Subjek 1 juga secara status golongan kasta berada lebih tinggi daripada kedua subjek lainnya sehingga mempengaruhi cara pandangnya dalam memaknai peraturan di lingkungan adatnya. Persepsi sosial juga terbentuk melalui cara penilaian masing-masing subjek terhadap orang lain di luar dirinya. Adanya penilaian

terhadap orang lain merupakan tahapan lanjut setelah penilaian diri, untuk memperoleh persepsi terhadap konsep KKG berdasarkan budaya patriarki Bali. Penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap perempuan Bali, penilaian terhadap keluarga, dan penilaian terhadap anak. Ketiga subjek memiliki penilaian yang sama tentang pemaknaan multiperan oleh perempuan Bali karena mereka memahami benar tugas, dan kewajibannya sebagai perempuan Bali. Penilaian terhadap keluarga didominasi oleh Subjek 1 karena Subjek 1 sangat menghargai peranan keluarga yang membantunya menyelesaikan multiperannya sebagai perempuan Bali sehingga Subjek 1 mendasarkan segala tingkah lakunya atas ijin keluarga terutama dari pihak suami dan anak-anaknya.

Penilaian terhadap anak dimaknai secara beragam oleh masing-masing subjek. Subjek 1 memberikan penghargaan tertinggi kepada anak-anaknya yang terwujud dalam bentuk eksternalisasi peran reproduktif pada anak, penilaian positif terhadap anak, dan penolakan konsep Keluarga Berencana (KB). Subjek 2 lebih memfokuskan kepada proses internalisasi konsep KKG pada anak-anaknya, sedangkan Subjek 3 terkesan sedikit lebih acuh terhadap nilai anak karena bersikap permisif dalam pola asuh anak-anaknya meskipun tetap memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya dengan melakukan eksternalisasi konsep sistem pewarisan modern kepada anak-anaknya tersebut.

KESIMPULAN

Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) merupakan bentukan kata yang terdiri dari kesetaraan gender dan keadilan gender. Konsep KKG tersebut yang dipersepsikan oleh kaum perempuan Bali dengan berdasarkan budaya Bali yang berbentuk patriarki.

Kaum perempuan Bali dalam mempersepsi konsep KKG terhadap budaya patriarki Bali dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu atau disebut juga dengan faktor situasional, faktor ini terdiri dari kebudayaan Bali, pendidikan dan pola asuh. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu atau disebut juga faktor personal, yang meliputi persepsi, sikap, penilaian, kebutuhan, resistensi, dukungan sosial, penyesuaian diri, *beliefs* dan *future expectation*. Kedua faktor tersebut mempengaruhi hasil pemaknaan perempuan Bali terhadap konsep KKG berdasarkan perspektif budaya patriarki Bali.

Penilaian terhadap diri atau konsep diri pada masing-masing subjek cenderung positif karena memiliki kemampuan penerimaan diri, regulasi diri, dinamisme diri, komitmen terhadap peran reproduktif, penyajian diri, dan penyesuaian diri yang cukup baik. Dalam pembentukan konsep diri pada tiap subjek dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor dukungan sosial dan resistensi. Kedua faktor tersebut yang membedakan konsep diri pada tiap-tiap subjek.

Penilaian terhadap lingkungan, yang meliputi penilaian kepada perempuan Bali, penilaian kepada keluarga, dan penilaian kepada anak dimaknai secara positif berdasarkan pemaknaan pengalaman masing-masing subjek yang tercermin melalui faktor eksternal sebagai unsur pembentuknya. Penilaian terhadap perempuan Bali, meliputi multiperan, peran sentral perempuan dalam keluarga, dan penilaian terhadap figur perempuan Bali itu sendiri. Penilaian terhadap keluarga, meliputi kepedulian dan kepatuhan terhadap keluarga. Penilaian kepada anak meliputi eksternalisasi peran reproduktif pada anak, eksternalisasi konsep sistem pewarisan

modern, internalisasi konsep KKG pada anak, penilaian positif terhadap anak, sikap permisif dalam pengasuhan anak dan penolakan konsep KB.

Penilaian terhadap diri dan orang lain membentuk pemaknaan subjek terhadap konsep KKG. Ketiga subjek memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap konsep KKG yang dilihat berdasarkan sudut pandang budaya patriarki Bali. Adanya konsep ketidakadilan gender muncul sebagai pembanding terhadap konsep KKG yang dipersepsi. Berdasarkan kedua konsep tersebut, masing-masing subjek dapat menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap konsep KKG dalam budaya patriarki Bali.

Berdasarkan hasil penelitian, subjek memiliki persepsi berbeda-beda terhadap konsep KKG dalam budaya patriarki Bali karena adanya perbedaan pengalaman yang dimaknai secara berbeda pula. Perbedaan dalam persepsi perempuan Bali terhadap KKG dalam budaya patriarki Bali ditentukan oleh ada atau tidaknya penyesuaian diri dan dukungan sosial yang mendukung pembentukan konsep diri individu. Pada dasarnya, perempuan Bali memiliki faktor eksternal yang hampir serupa karena secara umum memiliki keseragaman kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, tetapi pada tahapan proses selanjutnya masing-masing subjek mengalami proses pembentukan konsep diri, penilaian terhadap lingkungan seperti pandangan terhadap sosok perempuan Bali itu sendiri, keluarga dan anak; penyesuaian diri, *beliefs*, dan *future expectation* yang berbeda berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya.

Proses pembentukan konsep diri dan penilaian terhadap lingkungan mempengaruhi proses kognisi masing-masing subjek dalam memandang kesetaraan dan keadilan gender pada budaya patriarki yang

selama ini telah dijalani. Adanya persepsi yang menyatakan budaya patriarki Bali adalah setara dan adil secara gender disebabkan karena adanya pembentukan konsep diri yang baik, dimana ketika muncul konflik atau permasalahan yang dirasa bertentangan antara sikap dengan lingkungan sosial, maka akan terjadi penyesuaian diri untuk memperoleh hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosialnya tersebut.

Penyesuaian diri yang baik pun tidak terlepas dari dukungan sosial, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan subjek dalam melakukan proses penyesuaian diri. Pada persepsi yang menyatakan bahwa budaya patriarki adalah tidak setara dan adil secara gender, ditemukan adanya suatu permasalahan yang tidak terselesaikan antara sikap subjek dengan lingkungan sosial. Permasalahan yang tidak selesai tersebut akan berpengaruh terhadap sikap subjek dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan mempengaruhi proses kognisinya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjani, N. L. (2006). Peran gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 1-22.
- Fakih, M. (2005). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geriya, S. S. (2006). Profil pendidikan dari masa ke masa. *Srikandi: Jurnal Studi Gender*, 6(1), 42-49.
- Ghufroon, M. N. & Rini, R. S. (2010). *Teori-teori psikologi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- Handayani, T. & Sugiarti. (2008). *Konsep dan teknik penelitian gender*. Malang: UMM Press.
- Manikgeni, J. M. G. S. (2007, Desember). Renungan akhir: Wanita. *Raditya*. 125, 72.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender*. Bandung: Mizan.
- Puspa, I. A. T. (2008, April). Kedudukan wanita dalam agama Hindu: Normatif dan realitas. *Raditya*. 129, 40.
- Putra, I. N. D. (2007). *Wanita Bali tempo doeloe: Perspektif masa kini*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sarwono, S. W. (1999). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Smet, B. (1994). *Psikologi kesehatan*. Jakarta: Grasindo
- Sudarta, W. (2006). Pola pengambilan keputusan suami-istri rumah tangga petani pada berbagai bidang kehidupan. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 65-83.
- Surpha, I. W. (2006). *Seputar desa pakraman dan adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Suryani, L. K. (2003). *Perempuan Bali kini*. Denpasar: Penerbit BP.
- Tirtayani, L. A. (2007). Wanita Bali dalam pemaknaan peran: Studi fenomenologis terhadap triple-roles wanita Bali, di desa adat Kuta. *Skripsi*. (Tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Tim Penyusun. (2000). *Materi pokok penyadaran gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Tim Penyusun. (2001). *Bahan informasi gender modul 2: Bagaimana mengatasi kesenjangan gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Wiasti, N. M. (2006). Hubungan industrial yang berwawasan gender: Studi kasus pada industri kerajinan bambu di desa Belega, kabupaten Gianyar, Bali. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 134-153.
- Wiana, I. K. (2000). *Makna agama dalam kehidupan: Semestinya kita malu kepada Tuhan*. Denpasar: PT. BP.